



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ancaman Pelanggaran ITE Untuk Pengiriman Somasi Melalui Media Elektronik

Jakarta, 18 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Selasa (18/08), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 50/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU ITE:

- *Pasal 29:*
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
- *Pasal 45B:*
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dalam sidang sebelumnya Pendahuluan (13/07), Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan beberapa saran perbaikan untuk kesempurnaan permohonan. Saran tersebut di antaranya menguraikan pasal-pasal yang diujikan. “Kalau dasar pengujiannya banyak, maka semuanya harus diuraikan satu persatu, sehingga hakim teryakini dimana sih letak pertentangannya,” ujarnya. Selain itu, Arief menyoroti Pemohon untuk mencermati pengiriman Somasi yang dulu melalui mass media, dengan perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan melalui media sosial elektronik namun apakah hal tersebut tidak kompetibel dengan UU ITE.

Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra pun memberikan catatan terkait identitas pemohon dan pokok permohonan yang belum menegaskan hak konstitusional yang dilanggar karena berlakunya pasal a quo. Untuk itu, Saldi mengharapkan agar Pemohon lebih menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sendiri atas pemberlakuan pasal a quo.



Pada Petitemnya, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), kecuali dimaknai “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kecuali menyampaikan informasi elektronik dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien Advokat atau Kantor Advokat” atau dimaknai “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan atau peringatan oleh Advokat atau Kantor Advokat dalam menjalankan tugas untuk membela kepentingan Klien”. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id